

Pengaruh kebijaksanaan inkremental terhadap pengembangan kepariwisataan di Pangandaran

Fransisca Mulyono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=81147&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini dilakukan atas dasar kecilnya proyeksi wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jawa Barat - jauh sekali bedanya dengan jumlah proyeksi wisman ke Jakarta ? padahal Jawa Barat mempunyai Pangandaran sebagai obyek wisata yang saat ini merupakan obyek wisata satu-satunya di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang mampu mengumpulkan pendapatan Rp. 1 milyar hanya dalam satu tahun.

Berangkat dari dasaran di atas penelitian ini memfokuskan kepada kebijaksanaan inkremental dalam bidang kepariwisataan yang ada di Daerah Tingkat II Ciamis, yang dikaitkan dengan desentralisasi dan koordinasi di Ciamis, dan ingin melihat pengaruhnya terhadap pengembangan kepariwisataan di Pangandaran.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pejabat yang berwenang menangani kepariwisataan, baik di Dati II Ciamis, Dati I Jawa Barat maupun dengan pihak Kanwil Parpostel sebagai wakil dari Deparpostel di Jawa Barat. Selain itu juga diterapkan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijaksanaan inkremental yang telah disusun oleh pihak Pemda Ciamis ternyata belum cukup untuk mengembangkan kepariwisataan di Pangandaran, mengingat masih belum seragamnya persepsi atas asas desentralisasi. Selain itu ternyata koordinasi yang seharusnya terjadi untuk mengembangkan kepariwisataan di Pangandaran belum memadai.

Jadi walaupun saat ini Pangandaran mampu mengumpulkan pendapatan sebesar Rp. 1 Milyar setahun, sebenarnya prestasi ini pada dasarnya bukan merupakan prestasi yang optimum, mengingat kawasan wisata di Pangandaran saat ini masih belum tertata dengan baik, disamping sifat wisatanya masih seasonal. Akibatnya adalah tujuan mengumpulkan devisa sebanyak mungkin belum mampu terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Karena itu dalam penelitian ini antara lain direkomendasikan agar ditata ulang persepsi atas asas desentralisasi sebagaimana yang seharusnya ditafsirkan seperti dalam pasal 1 butir (c) UU No. 5 tahun 1974. Selain itu persepsi dan sikap yang salah atas koordinasi selama ini juga sebaiknya dikikis, agar pengembangan kepariwisataan di Pangandaran akhirnya dapat berjalan dengan optimal.